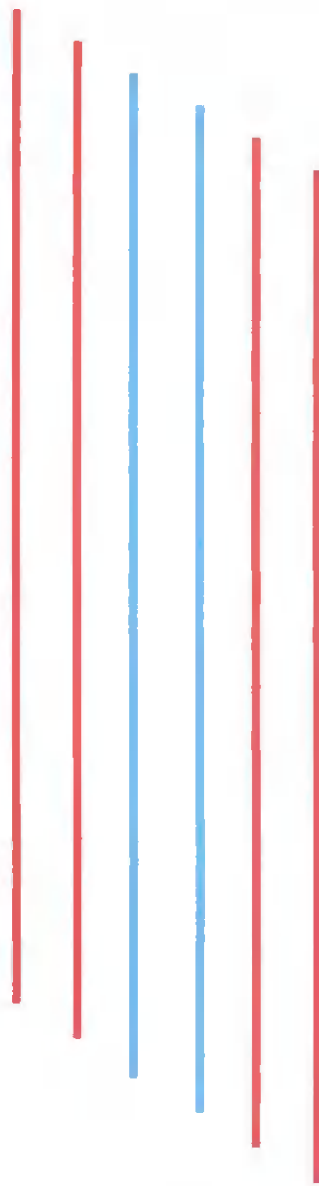


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2020



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2020. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2020 serta dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2020 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

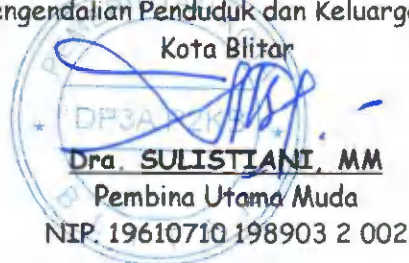
Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah - langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari hasil pelaksanaan kegiatan, data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya, untuk itu saran perbaikan dan pendampingan dari instansi pembina sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa-masa mendatang.

Demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2020, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, Februari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar



Dra. SULISTIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610710 198903 2 002

EXCECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

A. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2020, mengacu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kinerja Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar tahun 2019 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kota Blitar Tahun 2020.

B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagaimana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025 dan RPJMD tahun 2016 - 2021 tersebut, dan berbagai capaian pembangunan periode 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar lima tahun kedepan, dan tugas dan fungsi Dinas P3AP2 dan KB yang melaksanakan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2016-2021), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

1. VISI

Visi Pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada tahun 2016 - 2021 adalah :

"MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021 "

2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan "Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021" tersebut, ditempuh melalui semboyan "One For All All For One" yang dimaknai dimana satu untuk semua untuk satu adalah masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh hasil pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan, maka atas dasar makna misi dimaksud serta berlandaskan kepada makna visi Kota Blitar yang telah ditetapkan, terdapat 6 (enam) misi Kota Blitar periode 2016 - 2021 dimana Dinas P3AP2 dan KB merupakan SKPD yang mendukung dan melaksanakan tugas dan fungsi nya sesuai dengan visi dan misi Kota Blitar, kesinambungan dan keterkaitannya dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
Misi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan di Bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- b) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif
Misi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana, dan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator kinerjanya adalah Prosentase Angka Pertumbuhan Penduduk.
- c) Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso
Misi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, dengan sasaran menurunnya kasus KDRT dan trafficking, dan dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerjanya adalah

Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan KDRT dan kasus Perempuan dan Anak.

Guna menjawab isu-isu strategis, serta tantangan Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar, maka perlu ditetapkan kinerja utama dan indikator kinerja utama yang kemudian diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02%
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis/Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis sesuai dengan kegiatan, program, kebijakan, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja tiap-tiap kinerja utama pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02%	42,17%	117,07%	Sangat Berhasil
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	0,67	145,08%	Sangat Berhasil
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,00	2,14	93,00 %	Sangat Berhasil
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya rata - rata sebesar 111,03 %.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2020, dalam rangka pencapaian kinerja Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan Belanja Langsung sejumlah Rp 5.233.076.376,00 dari total anggaran sebesar Rp. 5.525.909.069,00 atau sebesar 94,70% dengan rincian Anggaran Belanja langsung per Kinerja Utama sebagai berikut :

Tujuan /Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02%	42,17%	117,07%	1.821.397.104	1.797.047.718	98,66%
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	0,67	145,08%	3.121.669.265	2.905.612.938	93,08%
Terselesaikan nya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	582.842.700	515.415.720	88,43%
JUMLAH					5.525.909.069	5.233.076.376	94,70%

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar
	Excecutive Summary
	Daftar Isi
Bab I	PENDAHULUAN
A	Latar Belakang
B	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
C	Maksud dan Tujuan
D	Dasar Hukum
E	Aspek - Aspek Strategis
F	Isu - Isu Strategis
Bab II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A	Rencana Strategis
B	Perjanjian Kinerja Tahun 2019
BAB IV	AKUNTABILITAS KINERJA
A	Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran
1.	Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020
2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2020
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
4.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
B.	Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Out Come)
1.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan
2.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran
3.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
C.	Penghargaan/Prestasi
BAB VIII	PENUTUP
A.	Kesimpulan
B.	Langkah Perbaikan

Lampiran

- A Rencana Strategis OPD Tahun 2016 - 2021
- B Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
- C Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- D Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem dan tata kelola administrasi instansi pemerintah diarahkan pada terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap satuan kerja dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta merealisasikan tujuan sebagaimana telah dirumuskan dalam visi dan misi organisasi satuan kerja. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah. Sejalan dengan itu maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengedepankan azas berdayaguna, berhasil guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta dengan menerapkan azas kepastian hukum, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas transparansi dan azas akuntabilitas.

Azas kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa setiap penyelenggara negara akan dikenai sanksi (administratif dan atau hukum) apabila terbukti melanggar peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Azas proporsionalitas mengacu pada pengertian rentang tanggung jawab pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berbanding lurus dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Azas profesionalitas berarti perwujudan pelaksanaan tugas setiap penyelenggara negara berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai latar belakang pendidikannya.

Azas transparansi adalah azas yang mengedepankan keterbukaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan sebagai bentuk partisipasi dalam memberikan masukan dan kontrol atas kinerja satuan kerja.

Azas akuntabilitas adalah azas yang mensyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan program kegiatan harus dapat dihitung dan diukur secara kualitatif maupun kuantitatif serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah azas-azas tersebut telah dilaksanakan serta sejauh mana tingkat capaian kinerja satuan kerja dalam melaksanakan program kegiatannya adalah dengan memantapkan sistem pelaporan yang baku, menyeluruh, terukur dan memiliki bobot analisis yang tinggi. Sistem dimaksud dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban satuan kerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P3AP2KB Tahun 2020 merupakan laporan kinerja yang didukung pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Rencana Kerja PD Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021. Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 yang disampaikan ini merupakan tahapan tahun ke lima Rencana Strategis tahun 2016 - 2021. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja PD Tahun 2020 serta target pembangunan tahun ke lima Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) dijelaskan pada Bab II Pasal 2 adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 63 tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar bahwa Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota Blitar dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar .

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas P3AP2KB Kota Blitar melaksanakan fungsi :

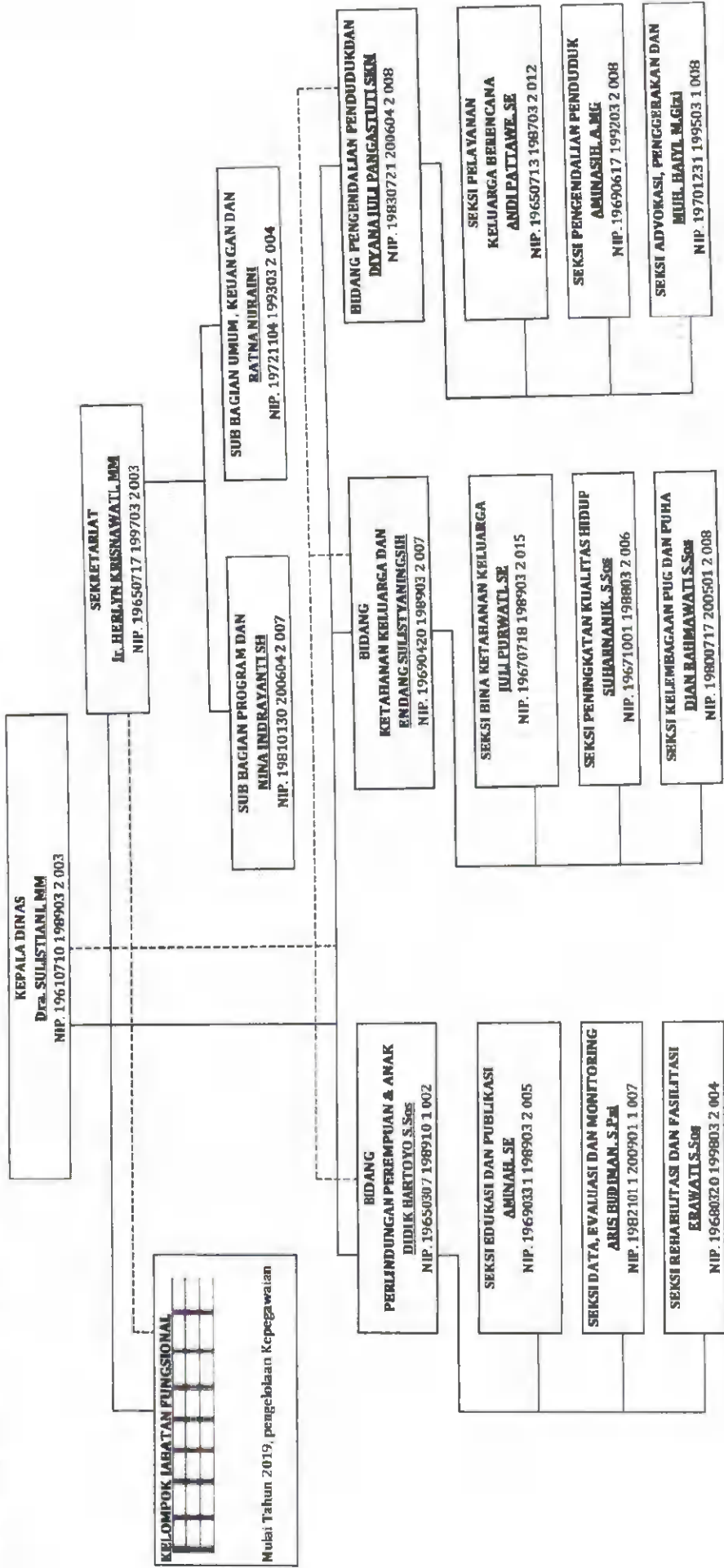
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional prosedur (sop);
9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip);
10. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur dan bagan organisasi Dinas P3AP2KB dapat dilihat seperti dibawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau capaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk menilai, mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang dinilai berdasarkan tolok ukur dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan dan menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Blitar tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2020 tentang P-APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Perubahan Kedua Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2020;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran P - APBD Tahun Anggaran 2020.

E. ASPEK - ASPEK STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, budaya dan pelayanan publik yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan wajib pelayanan non dasar yaitu Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dalam pemenuhan harapan tersebut, Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara lain :

1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana
3. Meningkatkan penanganan kasus Kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking

F. ISU - ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Blitar
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dan pembangunan
3. Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, Trafficking dan kasus perempuan dan anak lainnya) yang terjadi di Kota Blitar
4. Prosentase Pertumbuhan penduduk masih tinggi
5. Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan
6. Rata - rata jumlah anak yang dilahirkan pada wanita usia subur masih tinggi (diatas rata- rata Jawa Timur)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar termuat dalam Dokumen Renstra PD yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD, Visi dan Misi Pembangunan Kota Blitar dan bersifat indikatif.

Visi Pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada tahun 2016 - 2021 adalah **:"MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"**. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui semboyan "One For All All For One" yang dimaknai dimana satu untuk semua semua untuk satu adalah masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan seluruh hasil pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas dan Berdaya Saing Tinggi
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berbasis pada Sistem Pelayanan Berkualitas dan Partisipatif
5. Meningkatkan Keharmonisan Sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional

Berpedoman pada visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagai mana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025 dan RPJMD tahun 2016-2021 tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar menetapkan Rencana Strategis 2016 - 2021 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan DP3AP2KB Kota Blitar lima tahun kedepan, sehingga terwujud pembangunan yang berkesinambungan sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB menunjukkan bagaimana cara Dinas P3AP2KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas P3AP2KB dan target kinerja

hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB. Strategi dan arah kebijakan Dinas P3AP2KB ditunjukkan sebagai berikut:

VISI		Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021	
MISI III		Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah	Peningkatan partisipasi dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pembangunan daerah
MISI IV		Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif	
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera
MISI V		Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso	
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Optimalisasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam Penanganan Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai kinerja DP3AP2KB Kota Blitar, dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja ini didasarkan kepada Rencana kinerja Tahunan yang didalamnya memuat indikator kinerja beserta targetnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar TA. 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,00
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
I	Program Pelayanan Perkantoran	896.876.975,00
II	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	63.233.000,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	10.065.000,00
IV	Program Pemberdayaan Perempuan	1.039.032.150,00
V	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.335.336.665,00
VI	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	812.975.800,00
VII	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	309.338.400,00
JUMLAH		6.466.857.990,00

(sebagaimana terlampir)

Dengan adanya perubahan anggaran maka pada tanggal 23 Oktober 2020, Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,00
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.059.254,00	
II	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	63.825.100,00	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.505.000,00	
IV	Program Pemberdayaan Perempuan	969.007.750,00	
V	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	2.945.023.865,00	
VI	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	582.842.700,00	
VII	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	176.645.400,00	
JUMLAH		5.525.909.069,00	

(sebagaimana terlampir)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas P3AP2 dan KB Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2020, realisasi kinerja tahun 2020 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2019), serta realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir RENSTRA 2016 - 2021. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2020

Pengukuran Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2020 menggunakan metode seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Pengukuran Realisasi Kinerja Utama Tahun 2020

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02%	42,17%	117,07 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	0,67	145,08 %
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	2,14	93%

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %

Kinerja Utama 1 : Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran strategis / Kinerja Utama 1 "Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan" dengan indikator kinerja utama "Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan" merupakan sasaran dari Renstra Dinas P3AP2KB, yang dihitung dengan formula penghitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase partisipasi} & \quad \text{Jumlah Perempuan yang terlibat dalam} \\
 \text{perempuan dalam} & \quad \text{organisasi masyarakat} \\
 \text{pembangunan} & = \frac{\text{Jumlah wanita usia 17 - 60 tahun di}}{\text{Kota Blitar}} \times 100 \% \\
 & = \frac{21.390}{50.718} \times 100 \% \\
 & = 42,17 \%
 \end{aligned}$$

Dari formulasi penghitungan diatas didapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama ini **melampaui** target yang telah ditetapkan yaitu presentase **42,17 %** dari target yaitu **36,02%**, hal ini berarti bahwa capaian kinerja sasaran strategis adalah **117,07%** yang berarti indikator tersebut dapat dilaksanakan dan dicapai dengan **sangat baik/berhasil**.

Data Jumlah Perempuan yang terlibat dalam organisasi masyarakat diatas diperoleh dari pendataan / updating data dari Gabungan Organisasi Perempuan se Kota Blitar (GOW Kota Blitar) dan juga data partisipasi perempuan yang lain yang berada di wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Blitar. Jumlah Perempuan yang terlibat dalam organisasi masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	NAMA ORGANISASI	JML ANGGOTA		+/-
		2020	2019	
1	DPRD	3	3	0
2	Pemerintah Kota Blitar	1638	1.638	0
3	PC Fatayat NU Kota Blitar	1443	1.443	0
4	Persit Kartika Chandra Kirana Yonif 511	743	734	9
5	SALIMAH (Persaudaraan Muslimah)	143	121	22
6	WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia)	150	184	-34
7	Muslimat NU	2758	2.758	0
8	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)	175	144	31
9	PIVERI	725	725	0
10	AISYIAH	1229	1.229	0
11	Dharma Yukti Karini (Pengadilan Negeri)	80	80	0
12	Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0808	604	604	0
13	PERWOSI	99	99	0
14	PERIP (Persatuan Istri Purnawirawan)	1437	593	844
15	Bhayangkari	78	21	57
16	Al Hidayah	35	35	0
17	Nasiatul Aisyiyah	112	33	79
18	PERWARI	26	26	0
19	Himpunan Wanita karya (HWK)	22	22	0
20	Adiyaksa Dharma Karini (Kejaksaan)	21	23	-2
21	Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDID)	25	15	10
22	Dharma Wanita Persatuan	3945	3.945	0
23	KPI (Koalisi Perempuan Indonesia)	-	20	-20
24	Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)	664	664	0

NO	NAMA ORGANISASI	JML ANGGOTA		+/-
		2020	2019	
25	AKU (AsosiasiKelompok UPPKS)	728	728	0
26	Forum Kopwan	1526	1.604	-78
27	LPMK/RW/RT	126	126	0
28	PPKBD dan Sub PKBD	341	341	0
29	Forum Kota Sehat	177	177	0
30	Forum PUSPA	35	30	5
31	KWT	2302	2.302	0
JUMLAH TOTAL		21.390	20.467	923

Data perempuan yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan pada tahun 2020 berjumlah 21.390 orang. Hal ini mengalami peningkatan sejumlah 923 orang dari tahun 2019 lalu dengan total jumlah Perempuan yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan sejumlah 20.467 orang. Penambahan anggota tersebut diketahui berdasarkan validasi data/Updating data anggota organisasi dilakukan oleh DP3AP2KB secara berkala. Dari hasil Updating tersebut diketahui, penambahan tersebut berasal karena adanya anggota telah pensiun, pindah keluar daerah, baru bergabungnya organisasi serta adanya organisasi yang tidak aktif lagi bergerak di masyarakat. Sedangkan data Jumlah wanita usia 17 - 60 tahun di Kota Blitar diambil dari data yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Blitar.

Sasaran strategis ini merupakan cara untuk mendukung tercapainya Tujuan Renstra yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dimana Tujuan Renstra merupakan Sasaran RPJMD. Pada tahun 2020 target Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 98,23 dan dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 67,57. Sedangkan realisasi tahun 2020 antara lain : Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 97,6 dan dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah 69,27. Dengan demikian target Tujuan Renstra **sangat berhasil** dengan realisasi kinerja adalah 99,36 % dan 102,52 %.

Data IPG dan IDG yang digunakan adalah data hasil penghitungan mandiri oleh DP3AP2KB bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang yang dilaksanakan pada akhir tahun 2020 ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB berdasarkan rekomendasi atau evaluasi dari tahun 2019 yang lalu. Dimana

pada tahun - tahun sebelumnya kita selalu menggunakan data proyeksi IPG dan IDG dikarenakan data Indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Indeks pembangunan gender (IPG) yang dapat menghitung dan merilis data secara resmi adalah BPS Provinsi Jawa Timur dan baru akan diterbitkan pada semester pertama tahun 2020.

Capaian kinerja program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran kinerja strategis pada umumnya tercapai lebih dari 100 %, bahkan untuk target kinerja program seluruhnya tercapai melebihi target yang telah ditentukan sehingga DP3AP2KB telah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditentukan demi mencapai target kinerja utama yang telah ditentukan.

Penilaian APE (Anugerah Parahita Ekapraya) pada tahun 2020 ini ditunda pelaksanaannya sampai dengan awal tahun 2021. Penundaan tersebut disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19. Namun begitu pelaksanaan persiapan penilaian APE tetap dilaksanakan oleh Tim Pemerintah Kota Blitar dan terus didukung oleh seluruh OPD di Kota Blitar. Pada tahun 2020 ini seluruh OPD di Pemerintah Kota Blitar telah menyusun PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif gender), dan telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi oleh Tim Inspektorat Daerah Kota Blitar.

Faktor - faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan realisasi kinerja pada sasaran diatas antara lain :

- a. Bertambahnya jumlah organisasi perempuan dan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Meningkatnya keterlibatan/partsisipasi perempuan dalam proses pembangunan
- c. Koordinasi yang baik dengan pihak/lembaga terkait dan seluruh elemen masyarakat terutama perempuan di Kota Blitar
- d. Perhatian dan komitmen pemerintah Kota Blitar terhadap program pemberdayaan perempuan.

Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun 2020 ini merupakan tahun berat bagi bangsa Indonesia khususnya Pemerintah Kota Blitar dikarenakan ada Pandemi Covid 19 yang sampai sekarang belum mereda. Namun begitu pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar dapat dinyatakan berhasil karena semua capaian indikator sasaran tercapai sesuai target. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

Permasalahan

- Masih rendahnya proporsi keterwakilan perempuan di parlemen, manajer, tenaga profesional dan kontribusi ekonomi;
- Gap antara nilai IPM laki-laki dan nilai IPM Perempuan per tahun semakin besar;
- Adanya beberapa rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid 19;
- Dengan adanya pandemi seperti ini, maka kegiatan yang sifatnya pembinaan / mengumpulkan orang banyak tidak diperbolehkan dan sebagian anggaran dimanfaatkan / dialihkan untuk penanganan Covid 19;

Solusi

- Menyamakan proporsi tenaga profesional perempuan (50%), meningkatkan pendapatan perempuan dan menyamakan proporsi perempuan dalam parlemen (50%);
- Meningkatkan angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendapatan perkapita perempuan;
- Melaksanakan kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada dengan mengurangi jumlah peserta;
- Pelaksanaan Program dan Kegiatan mengikuti Protokol Kesehatan dan menyesuaikan anggaran yang ada;

Kinerja Utama 2 : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kota Blitar

Sasaran strategis / Kinerja Utama "Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar" dengan indikator kinerja utama "Laju Pertumbuhan Penduduk" merupakan Tujuan dari Renstra Dinas P3AP2KB, yang dihitung dengan formula penghitungan :

$$\begin{aligned} \text{Laju} &= \{(P_t/P_0)^{(1/t)} - 1\} \times 100 & r &= \text{LPP} \\ \text{Pertumbuhan} & & P_t &= \text{Penduduk Tahun Sekarang} \\ \text{Penduduk (r)} & & P_0 &= \text{Penduduk tahun sebelumnya} \\ & & t &= \text{selisih tahun sekarang dengan} \\ & & & \text{sebelumnya} \\ &= 0.67 \text{ (sumber data dari BPS)} \end{aligned}$$

Dari formulasi penghitungan diatas didapatkan bahwa Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 adalah 0.67, hal ini berarti capaian kinerjanya adalah **145,08%** dari target sebesar 1,22 dan merupakan pencapaian yang **Sangat Berhasil**. Capaian tahun

2020 menurun sedikit sekali dibanding tahun lalu, yaitu 0,64. Hal ini banyak faktor yang menjadi penyebab turunnya nilai LPP pada tahun 2020 diantaranya Jumlah kelahiran, Jumlah kematian dan Jumlah Migrasi dimana Dinas P3AP2Kb tidak semuanya bisa mempengaruhi dalam penambahan tersebut.

Indikator Kinerja Utama diatas didukung dengan **Sasaran** dari Restra DP3AP2KB yaitu Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi, dengan indikator Total Fertility Rate (TFR), dengan target kinerja 2.00. Pada akhir tahun 2020 telah dihasilkan perhitungan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,14. Dengan demikian capaian kinerja Total Fertility Rate (TFR) sebesar **93%** dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Pada tahun 2020 ini merupakan tahun berat bagi pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dimana dengan adanya pandemi covid 19 ini, beberapa kegiatan harus dibatalkan maupun merubah cara pelaksanaan kegiatannya. Dimana banyak sekali kegiatan pada urusan ini yang sifatnya mengumpulkan massa dan melakukan tindakan medis.

Capaian Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 secara umum capaian target pelaksanaannya adalah sangat berhasil meskipun tidak tercapai 100%. Pada tahun 2020 ini, capaian Persentase angka kesertaan ber KB atau CPR (contraceptive prevalence rate) adalah 74,31%. Meskipun tidak tercapai 100% namun telah dapat dinyatakan sangat berhasil dengan tingkat capaian sebesar 98,88% dari target 75,15%.

Namun untuk menekan semakin menurunnya CPR, telah dilaksanakan perubahan strategi pembinaan KB Aktif dan KB Baru dimana sasaran KB lebih diutamakan bagi PUS yang sedang hamil dan setelah melahirkan langsung mendapat pelayanan KB. Selain itu upaya untuk pembinaan KB Aktif bagi PUS harus lebih dioptimalkan. Juga dengan optimalisasi pelayanan KB terutama untuk KB MJKP. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan Pelayanan MOP (Metode Operasi Pria), hal ini dikarenakan resiko penularan virus covid 19 dan keamanan kondisi kesehatan akseptor serta tenaga medis. Namun Pelayanan MOW (Metode Operasi Wanita) telah berhasil dilaksanakan pada awal tahun dengan sasaran akseptor sejumlah 42 orang.

Meskipun begitu capaian CPR (contraceptive prevalence rate) di Kota Blitar pada tahun 2020 masih sangat bagus jika dibandingkan dengan capaian CPR Propinsi Jawa Timur, dimana capaian CPR Jawa Timur sebesar 62,1%. Tingginya capaian CPR di Kota

Blitar ini menggambarkan bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam ber KB dan menjaga kelestarian untuk terus ber KB sangat tinggi yang akhirnya berdampak pada terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar.

Sedangkan capaian median usia menikah pertama Penduduk Wanita di Kota Blitar berada pada angka 25,3. Hal ini berarti capaiannya berada pada 120,48% dari target yang ditentukan yaitu 21. Dan hal ini juga lebih baik dari hasil survey susenas senilai 22. Hal ini berarti bahwa usia nikah pertama penduduk wanita di Kota Blitar dapat dikatakan berada pada angka yang ideal >20.

Selain itu tingkat capaian Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB juga melampaui target capaian yaitu 101,97% dari 91,9% yang ditargetkan. Capaian pada tahun 2020 ini terdapat 93,71% anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB, sehingga hanya 6,29% dari seluruh anggota Tribina dan UPPKS yang belum ber KB. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya karena sudah menopause maupun PUS yang menginginkan anak pada tahun 2020 ini.

Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS pada masa pandemi ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan kegiatannya. Dimana kelompok - kelompok tersebut tetap harus di bina untuk pelaksanaan Ketahanan Keluarga, namun disisi lain harus tetap menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS pada tahun ini dilaksanakan dengan metode jemput bola, yaitu pembinaan dilaksanakan dengan lingkup pertemuan yang kecil, dengan mendatangi sekretariat kelompok atau di rumah kader yang bersedia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Salah satu langkah untuk tercapainya target kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga dilaksanakan melalui Optimalisasi Kampung KB. Kegiatan inovasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB pada tahun 2020 ini adalah dengan membentuk 1 (satu) kampung KB baru di Kelurahan Pakunden dengan nama Kampung KB Berseri. Dengan demikian pada tahun 2020 ini terdapat sejumlah 6 (Enam) Kampung KB, yaitu :

1. Kampung KB Jausenan Sentosa Kelurahan Tanjungsari
2. Kampung KB Sejahtera Kelurahan Sentul
3. Kampung KB Rahardjo Kelurahan Blitar

4. Kampung KB Rahayu Kelurahan Klampok
5. Kampung KB Makmur Kelurahan Plosokerep
6. Kampung KB Berseri Kelurahan Pakunden

Implementasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kampung KB ini merupakan langkah solutif untuk meningkatkan capaian Program yang menyentuh langsung sasaran, dimana dengan adanya Kampung KB dibentuk masing - masing Kelompok Tribina dan UPPKS yang dikembangkan menjadi COE (Center of Exelent) bagi Kelompok - Kelompok Tribina dan UPPKS di Kelurahan lainnya. Selain itu melalui Kampung KB Peran Serta Lintas Sektor untuk mendukung capaian Program Pengendalian Penduduk dan KB juga meningkat salah satunya dalam Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kampung KB dan intervensi Bidang Kesehatan dalam taman posyandu, Posyandu Balita serta Posyandu Lansia.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan KB didukung oleh peran serta semua Lintas Sektor dan kerja keras Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) utamanya dalam penggerakan peran serta masyarakat dalam meningkatkan capaian program KKBPK di Kota Blitar.

Permasalahan dan Solusi

Dengan adanya pandemi Covi 19 ini, pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar meskipun berat dapat dinyatakan berhasil karena semua capaian indikator sasaran program dan kegiatan tercapai sesuai target. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

Permasalahan

- a. Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk penanganan Covid 19;
- b. Selama pandemi covid 19 ini upaya untuk melakukan pembinaan KB aktif kurang optimal sehingga mengakibatkan kesertaan Kb menurun;
- c. Adanya pandemi rencana kegiatan mengalami perubahan;
- d. Pelaksanaan MOP tidak jadi dilaksanakan di karenakan Dikarenakan resiko penularan virus covid dan keamanan kondisi kesehatan akseptor serta tenaga medis;
- e. Kekurangan anggaran untuk Penambahan Kampung KB baru supaya dapat mensupport pelaksanaan program KB di Kota Blitar;

- f. Upaya peningkatan kinerja dan pengembangan kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD terkendala dikarenakan adanya larangan mobilisasi massa pada masa pandemi covid 19;
- g. Keterbatasan ruang gerak dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi covid 19.

Solusi

- a. Memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia;
- b. Optimalisasi KIE kepada pasangan usia subur dengan merubah strategi KIE yang sebelumnya harus dengan tatap muka beralih KIE interpersonal dengan daring;
- c. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap dikarenakan tidak dapat melaksanakan kegiatan secara langsung dengan banyak sasaran;
- d. Mengalihkan anggaran untuk keperluan sarana dan prasarana Kampung KB baru;
- e. Adanya tambahan anggaran dari pengalihan beberapa kegiatan pada program yang sama terutama untuk penambahan lokasi baru kampung KB yaitu di Kelurahan Pakunden terutama untuk keperluan sarana dan prasarana di kampung KB tersebut;
- f. Tetap melaksanakan pembinaan Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD) dengan metode yang berbeda - beda, baik dilaksanakan secara daring, jemput bola maupun pelaksanaan tatap muka dengan sasaran yang sangat kecil dan bergantian;
- g. Tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah di tetapkan namun dengan merubah pola dan cara dari pelaksanaan kegiatan, baik dilaksanakan secara bertahap dan daring.

Kinerja Utama 3 : terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran strategis / Kinerja Utama "Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak" dengan indikator kinerja utama "Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak" merupakan Tujuan dari Renstra Dinas P3AP2KB, yang dihitung dengan formula penghitungan :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penyelesaian kasus} \\ \text{kekerasan terhadap} \\ \text{perempuan dan anak} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Kasus kekerasan terhadap} \\ \text{perempuan dan anak yang diselesaikan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Kasus kekerasan terhadap} \\ \text{perempuan dan anak yang dilaporkan} \end{array}} \times 100 \%$$

$$= \frac{29}{29} \times 100 \% = 100 \%$$

Dari formulasi penghitungan diatas didapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama ini telah memenuhi target dengan presentase **100%** dari target yaitu **100%**, dengan demikian capaian kinerja mencapai 100 % dengan predikat **sangat berhasil**.

Indikator Kinerja Utama diatas didukung dengan **Indikator Sasaran** dari Restra DP3AP2KB yaitu Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target kinerja 100 %. Dalam satu tahun ini kasus yang dilaporkan di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) sejumlah 29 kasus, dengan rician jumlah dan jenis sebagai berikut :

Daftar Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak TA 2019

No	Jenis Kasus	Locus dan Personal Terlapor	
		Kota Blitar	Luar Kota Blitar
1	Anak Berhubungan Dengan Hukum	1	-
2	KDRT	3	-
3	Kekerasan Seksual	2	-
4	Konseling	6	-
5	Perlindungan	17	-
6	Perkelahian Pelajar	-	-
7	Penganiayaan	-	-
	Jumlah	29	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh kasus yang masuk di P2TP2A seluruhnya tertangani dan terselesaikan. Dengan demikian indikator sasaran Renstra yaitu Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target kinerja 100 %, dapat dicapai 100% seluruhnya dengan predikat **sangat berhasil**.

Sedangkan untuk sasaran kinerja "Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak" dengan indikator kinerja utama "Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak" juga tercapai 100 %. Karena 29 kasus yang dilaporkan semuanya tertangani. Dengan adanya Satgas PPA di Kecamatan dan Kelurahan sangat membantu penyelesaian dan penanganan kasus yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB.

Dengan adanya Pandemi Covid 19 ini, pelaksanaan penerimaan pengaduan dan penanganan kasus tetap berjalan seperti halnya sebelum pandemi covid 19. Namun tentu saja dilaksanakan dengan sangat hati - hati dengan menerapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

Pada tahun 2020 ini, kegiatan Sidak atau operasi gabungan pada tempat - tempat yang disinyalir dapat menimbulkan dan disalahgunakan oleh para siswa yang membolos sekolah dan tempat nongkrong remaja tetap dilaksanakan sebagai tindakan pencegahan timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama oleh banyak pihak antara lain DPRD Kota Blitar, DP3AP2KB, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan organisasi masyarakat lainnya. Kegiatan ini dirasa cukup membawa hasil dengan menurunnya kasus perlindungan anak yang dilaporkan dibanding pada tahun 2019 sebanyak 57 dan tahun 2020 sebanyak 29 kasus.

Pada tahun 2020 ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 tidak dilaksanakan evaluasi Kota Layak Anak oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun begitu di tingkat Pemerintah Kota Blitar tetap melaksanakan Evaluasi yang dilaksanakan secara internal Pemerintah Kota Blitar, dan seluruh OPD di Kota Blitar tetap mendukung untuk Kota Blitar sebagai Kota Layak Anak.

Beberapa keluaran atau output kegiatan mengalami beberapa perubahan dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 ini, terutama untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang/massa dalam jumlah banyak pada satu tempat. Fasilitasi edukasi dan publikasi PPA di sekolah yang pada tahun 2020 ditargetkan untuk 30 sekolah, dikarenakan adanya metode sekolah secara daring maka hanya dapat dilaksanakan untuk 8 sekolah saja yang dilaksanakan sebelum merebaknya Covid 19 (awal tahun). Kegiatan tersebut dialihkan untuk sosialisasi PPA dimasyarakat secara tatap muka namun dengan metode bergantian dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan juga dialihkan publikasi PPA melalui sarana yang lain diantaranya melalui media elektronik atau spot di radio baik swasta maupun radio mahardika.

Juga untuk Peringatan Hari Anak Nasional dan Gebyar Forum Anak, yang seyogyanya akan dilaksanakan dengan mengumpulkan +/- 2.500 anak tidak jadi dilaksanakan mengingat resiko dan himbauan pemerintah, maka dialihkan dengan penyediaan sarana dan prasarana Puspaga dan Forum Anak.

Permasalahan dan Solusi

Meskipun di era pandemi Covid 19 ini, pelaksanaan Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kota Blitar dapat dinyatakan berhasil karena semua capaian indikator sasaran tercapai sesuai target. Namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

Permasalahan

- a. Di era pandemi ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh tim, termasuk sosialisasi ke berbagai organisasi dan sekolah;
- b. Masa pandemi covid 19 menyebabkan ruang gerak pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak, baik dalam upaya pencegahan kekerasan, fasilitasi kelembagaan maupun layanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sedikit terkendala;
- c. Publikasi dan edukasi Perlindungan Perempuan di Sekolah tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang mengharuskan sekolah secara daring dan masuk secara bergantian.

Solusi

- a. Melaksanakan sosialisasi melalui media lainya, antara lain : Spot dan talkshow baik di radio swasta dan Mahardika, ledang berkeliling, serta papan himbauan di beberapa titik di Kota Blitar;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperhatikan protokol kesehatan, memfokuskan sasaran kegiatan pada penguatan kelembagaan, baik sarana dan prasarana serta regulasi dalam pemenuhan hak anak dan pengoptimalan kegiatan perlindungan perempuan dan anak melalui fasilitas Daring
- c. Mengalihkan edukasi dan publikasi secara tatap muka menjadi roll banner elektrik yang dikirimkan ke sekolah.

Dengan demikian Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tdk Brhsl
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	117,07%	√			
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	145,08 %	√			
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	93%	√			
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	√			
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	√			
Rata - rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran		111,03 %	Sangat Berhasil			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja utama tersebut, menunjukkan bahwa capaian kinerja oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar selama tahun 2019 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja 111,03 %.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2020

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi		Capaian(%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	35,9 0%	36,0 2%	45,9 0 %	42,1 7%	127, 86 %	117,0 7%
2	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	1,22	0,64	0,67	147, 54%	145, 08%
3	Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,03	2	2,03	2,14	100 %	93%
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi		Capaian(%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Persentase capaian target kinerja "Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan" mengalami penurunan capaian pada tahun 2020 ini. Namun demikian, persentase capaian target tetap melebihi 100% sehingga termasuk dalam kategori sangat berhasil.
 2. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) secara umum selama 2 tahun kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah memenuhi target capaian;
 3. Capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu 100 % pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen DP3AP2KB dalam bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun dengan berbagai permasalahan yang terjadi, namun tetap dapat mencapai target, yaitu menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.
3. **Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra**
- Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2020 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,15%	42,17%	116,65%
Menurunnya rata – rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	0,67	145,08%
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,00	2,14	93,00 %
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang telah mencapai lebih dari target yang ditentukan pada tahun ke 4 (empat) renstra, namun terdapat pula capaian indikator kinerja yang belum mencapai 100%. Capaian dimaksud yaitu menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi yang masih tercapai 93% dari target. Namun demikian DP3AP2KB akan berusaha untuk mewujudkan Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi sesuai dengan target yaitu 2(Dua) pada akhir tahun renstra tahun 2021 mendatang.

Meskipun capaian indikator tersebut rata - rata telah dikategorikan Sangat Berhasil dengan Renstra Dinas P3Ap2KB Kota Blitar.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Perbandingan Realisasi kinerja daerah dengan realisasi nasional pada tahun 2020 ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Nasional	Realisasi TA 2020	Ket
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	-	42,17%	Tidak Ada Target Nasional
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.31	0,67	Lebih Baik
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,45	2,14	Lebih Baik
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	100 %	Tidak Ada Target Nasional
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	100 %	Tidak Ada Target Nasional

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tingkat nasional banyak yang tidak ada target nasional dan juga belum release.

Target SPM (Standar Pelayanan Minimal) hanya diatur sampai tahun 2015, sedangkan mulai tahun 2016 dan seterusnya, OPD hanya menyajikan data SPM sesuai indikatornya saja. Pada Dinas P3AP2KB ada 2 SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang harus disajikan datanya, yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Perlindungan

Perempuan dan Anak dan bidang Keluarga Berencana. Data capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Keluarga Berencana pada tahun 2019 - 2020 antara lain :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Target SPM tahun 2019 dan 2020
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2018	2019
Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00 %	100,00 %
Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	0,00%	0,00%
Rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan Rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100,00 %	100,00 %
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100,00 %	100,00 %
Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00 %	100,00 %
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100,00 %	100,00 %

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2018	2019
Pemulangan dan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0,00%	0,00%
	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0,00%	0,00%

Sedangkan Data capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2019 - 2020 antara lain :

**Perbandingan Realisasi Kinerja Target SPM tahun 2019 dan 2020
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2019	2020
Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (3,5%)	85,00%	
	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (65%)	72,04%	74,31%
	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (5%)	8,05%	9,09%
	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB (70%)	96,39%	93,71%
	Cakupan PUS peserta KB Anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%)	97,12%	93,71%
	Ratio petugas lapangan keluarga berencana/ penyuluhan keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan	127,27%	127,27%
	Ratio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap Desa/Kelurahan	100,00%	100,00%

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR DAN NILAI SPM	REALISASI DAERAH	
		2019	2020
Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100,00%	100,00%
Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100,00%	100,00%

Dari 2 tabel capaian SPM SPM (Standar Pelayanan Minimal) diatas diketahui bahwa capaian indikator Kinerja SPM SPM (Standar Pelayanan Minimal) terus mengalami peningkatan yang baik meskipun tidak secara signifikan. Dan beberapa indikator terjaga kestabilan pencapaiannya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUT COME)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas P3AP2KB Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2020 jumlah anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2020

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.153.582.427,00	2.837.704.712,00	89,98%
2	Belanja Langsung	5.525.909.069,00	5.218.076.377,66	94,43%
Jumlah		8.679.491.496,00	8.146.505.489,66	93,86%

Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program / kegiatan tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
I	Program Pemberdayaan Perempuan	969.007.750	964.611.815	99,55
1	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	496.967.200	494.598.565	99,52
2	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	92.820.100	92.643.500	99,81

No	Program / Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
3	Kelembagaan Pengarustamaan Gender	279.990.550	278.150.150	99,34
4	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	99.229.900	99.219.600	99,99
II	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.945.023.865	2.733.905.438	92,83
5	Advokasi , Penggerakan dan Informasi tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	462.568.865	458.316.165	99,08
6	Pelayanan Keluarga Berencana	404.205.500	397.005.950	98,22
7	Pengendalian Penduduk	208.628.500	200.643.100	96,17
8	Revitalisasi Program KB	1.869.621.000	1.677.940.223	89,75
III	Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga	176.645.400	171.707.500	97,20
9	Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga	176.645.400	171.707.500	97,20
IV	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	582.842.700	515.415.720	88,43
10	Edukasi dan Publikasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	151.046.300	151.019.500	99,98%
11	Rehabilitasi dan Fasilitas Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	276.303.000	139.121.800	69,83
12	Fasilitas, Evaluasi dan Monitoring tentang Kota Layak Anak	338.900.000	225.274.420	96,86
V	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	780.059.254	760.129.903	97,45
13	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	67.401.935	67.135.400	99,60
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	106.285.279	106.283.989	100,00
15	Penyediaan Jasa Perkantoran	1.500.000	1.500.000	100,00
16	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	583.802.040	564.140.514	96,63
17	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	17.670.000	17.670.000	100,00
18	Penyusunan Laporan Keuangan	3.400.000	3.400.000	100,00

No	Program / Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
VI	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	63.825.100	63.803.000	99,97
19	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	52.698.100	52.676.000	99,96
20	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	11.127.000	11.127.000	100
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.505.000	8.503.000	99,98
21	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8.505.000	8.503.000	99,98
JUMLAH		5.525.909.069	5.233.076.376	94,70%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.233.076.376 dari total anggaran sebesar Rp. 5.525.909.069 atau sebesar 94,70%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2020 termasuk tinggi.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas P3Ap2KB Tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama/Program	Indikator	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	1.821.397.104	32,96%
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	3.121.669.265	56,49%
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	582.842.700	10,55%
JUMLAH		5.525.909.069	100%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas P3Ap2KB Kota Blitar Tahun 2020 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tujuan /Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02%	42,17%	117,07%	1.821.397.104	1.797.047.718	98,66%
Program							
Program Pemberdayaa n Perempuan	Persentase Perempuan yang aktif pada organisasi atau lembaga kemasyarakatan	16%	26,96%	168,48 %	969.007.750	964.611.815	99,55%
	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen PPRG	11 unit	29 Unit	263,64 %			
Program Pelayanan Perkantoran	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100 %	780.059.254	760.129.903	97,45
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	100%	100%	100 %	63.825.100	63.803.000	99,97
Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	100 %	8.505.000	8.503.000	99,98

Tujuan /Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 2							
Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22	0,67	145,08 %	3.121.669.265	2.905.612.938	93,08%
Sasaran 2 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	2,14	93%			
Program							
Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase angka kesertaan ber KB atau CPR (contraceptive prevalence rate)	75,15%	74,31%	98,88%	2.945.023.865	2.733.905.438	92,83
	Capaian median usia nikah pertama wanita	21	25,3	79,52%			
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB	91,90%	93,71%	101,97%	176.645.400	171.707.500	97,20%
Tujuan 3							
Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	582.842.700	515.415.720	88,43%
Sasaran 3 Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%			

Tujuan /Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program							
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100%	100%	100	582.842.700	515.415.720	88,43%
	Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	90%	100%	111,11			
JUMLAH					5.525.909.069	5.233.076.376	94,70%

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	117,07%	98,66%	1,17
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	145,08%	93,08%	1,56
3	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	88,43%	1,13

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

1. **Sasaran Strategis 1** : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran "Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan" tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1,17 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 117,07%% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 98,66%;

2. **Sasaran Strategis 2** : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **"Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar "**, tingkat efisiensi di banding penyerapan anggaran sebesar 1,56 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 145,08% dapat dilaksanakan dengan anggaran sebesar 93,08%;
3. **Sasaran Strategis 3** : Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **"Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak "**, tingkat efisiensi di banding penyerapan anggaran sebesar 1,13 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100 % dapat dilaksanakan dengan anggaran sebesar 88,43%.

C. PRESTASI / PENGHARGAAN

Selama tahun 2020 ini tidak banyak perlombaan yang diadakan baik oleh tingkat Pemerintah Kota, Provinsi maupun Nasional, bahkan banyak perlombaan atau evaluasi yang ditunda. Namun begitu penghargaan yang dapat diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 antara lain :

1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 (**SAKIP**) dengan Predikat Nilai **A** **"Memuaskan"** dan menempati **peringkat ketiga** perolehan nilai SAKIP se Kota Blitar.
2. Juara 1 Peserta KB Lestari 20 Tahun Tingkat Propinsi Jawa Timur

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2020. Laporan ini juga akan dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang

Dalam beberapa hal yang telah disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja DP3AP2KB Kota Blitar pada tahun 2020 termasuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini dikarenakan capaian kinerjanya rata - rata sebesar **111,03 %**, walau dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala/permasalahan namun terdapat beberapa solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk menyelesaikannya. Adapun uraian capaian indikator sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan" dengan Indikator Kinerja Utama persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan, telah tercapai 117,07% dengan capaian kinerja 42,17% dengan kategori **Sangat Berhasil**;
2. Sasaran Strategis "Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar" dengan Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 0.67. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 145,08% dari target sebesar 1,22, dengan kategori **Sangat Berhasil**;
3. Sasaran Strategis "Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi" dengan Indikator Kinerja Total Fertility Rate (TFR), sebesar 2,14. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 93% dari target sebesar 2, dengan kategori **Sangat Berhasil**;
4. Sasaran Strategis "Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak" dengan Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah tercapai sesuai target yaitu 100% dengan capaian kinerja 100 %, dengan kategori **Sangat Berhasil**;

5. Sasaran Strategis "Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak" dengan Indikator Kinerja Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah tercapai sesuai target yaitu 100% dengan capaian kinerja 100 %, dengan kategori **Sangat Berhasil**

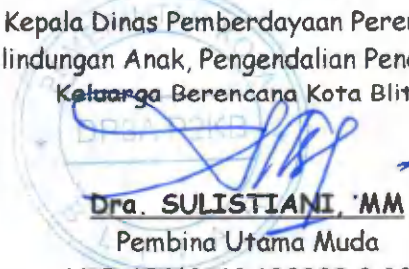
B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah - langkah perbaikan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Blitar untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama kedepan, antara lain :

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2021 akan lebih memperhatikan strategi pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, sehingga untuk pencapaian atas Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AP2KB, kegiatan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.
2. Pada tahun 2021 nanti akan tetap dilaksanakan penghitungan mandiri atas Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dengan penghitungan mandiri tersebut diharapkan dapat memperoleh nilai riil kondisi di Kota Blitar serta adanya analisis atas penghitungan dimaksud, sehingga dapat menentukan strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya.

Demikian semoga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2020 dapat sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta masukan bagi segenap pihak yang berkepentingan.

Blitar, Pebruari 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Blitar


Dra. SULISTIANI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610710 198903 2 002

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLUNDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2016 - 2021

- Visi MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021
- Misi
- III. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
 - IV. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
 - V. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso

Tujuan													Sasaran					Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran										
Uraian	Indikator Tujuan	Formula Penghitungan	Kondisi Awal					Target					Uraian	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal					Target					Kebijakan	Program dan Kegiatan	Ket
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017				2018	2019	2020	2021									
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan (misi ke 3)	Indeks pemberdayaan gender	Rumus kalkulator Indeks Pembangunan Gender	67,57	66,68	67,57	67,57	67,57	67,57	67,58	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dibagi jumlah wanita usia 17 - 60 tahun di kota Blitar dikalikan 100 %	NA	35,64	35,64	35,77	35,90	36,02	36,15	Meningkatkan partisipasi aktif perempuan (gender) dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan Perempuan							
Menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \frac{(P_t/P_0)^{1/(t-1)} - 1}{1} \times 100$	6,30	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) Perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	Σ 5 ASFR	2,30	2,10	2,05	2,03	2,01	2,00	2,00	Meningkatkan cakupan keluarga berencana dan sejahtera	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga					

Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan / jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani / jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak
																														Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
																														Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
																														Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

RENCANA KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02%	Program Pelayanan Perkantoran	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran	100%	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	45 jenis	67.401.935
							Jumlah barang cetakan yang tersedia	6 jenis	
							Jumlah lembar pengandaan	15000 lembar	
							Jumlah bahan bacaan yang tersedia	24 eks	
							Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	335 porsi	
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	67 rakor	106.285.279
							Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 kali	
						Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	9 rekening	583.802.040
							Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	40 unit	
							Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis	
							Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	3 jenis	
							Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 jenis	
							Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	11 jenis	
							Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	1 jenis	
							Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	
							Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	4 unit	
						Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	17.670.000
							Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	1 dokumen	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
						Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	4 dokumen	3.400.000
			Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi aktif perangkat daerah dalam agenda Pemda Kota Blitar	100%	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	1 even	52.698.100
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	2 jenis	11.127.000
			Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang aktif pada organisasi atau lembaga kemasyarakatan	16%	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 dokumen	8.505.000
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK yang terfasilitasi	664 orang	496.967.200
						Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah perempuan Kepala Keluarga yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	30 orang	92.820.100
							Jumlah peserta dalam rangka Hari Ibu	100 orang	
							Jumlah Perdamstra (Perempuan Berdayaguna Mandiri dan Sejahtera) yang mengikuti workshop	70 orang	
							Jumlah peserta Pelatihan Olahhan Makanan	50 orang	
					11 unit	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah peserta pelatihan dan Monev PPRG (Pelatihan dan Monev PPRG Kelurahan/Kecamatan)	72 orang	279.990.550
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen PPRG			Jumlah Kelurahan yang dilaksanakan Pembinaan dan Penguatan Program P2WKSS	1 Kelurahan	
							Jumlah peserta Inisiasi Pembentukan Kecamatan / Kelurahan Responsif Gender (Fasilitasi Forum Puspa Kota Blitar)	40 orang	

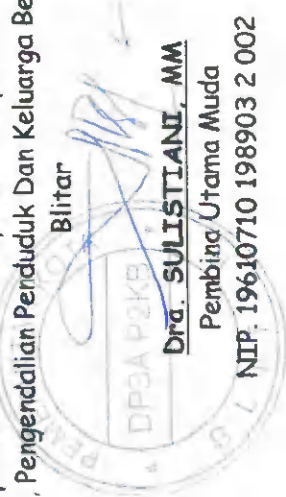
Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100%	Edukasi dan Publikasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah peserta Penguatan Kelembagaan Penilaian APE (Fasilitasi Penilaian APE)	70 orang	151.046.300
							Jumlah peserta Pelatihan / Training Fasilitator PUG (Capacity Building Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi Tim Focal Point PUG)	50 orang	
							Jumlah Peserta Workshop Percepatan PUG (pendampingan/desk penyusunan PPRG bagi Eselon IV)	29 orang	
							Jumlah dokumen data yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender	2 dokumen	
							Jumlah Organisasi Perempuan yang aktif	21 organisasi	
							Jumlah peserta Sosialisasi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)	150 orang	
							Jumlah fasilitasi Edukasi dan Sosialisasi PPA di Sekolah se-kota Blitar	8 sekolah	
							Jumlah jenis publikasi PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)	5 jenis	
							Jumlah peserta Sosialisasi PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	200 orang	
							Jumlah Fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	12 kali	
276.303.000	Rehabilitasi dan Fasilitasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan						Jumlah bingkisan peningkatan kesejahteraan bagi Pengurus P2TP2A	35 buah	
							Jumlah Peserta Pembinaan dan rapat rutin Satgas PPA	48 orang	
							Jumlah Peserta Rapat Rutin Pengurus P2TP2A	35 orang	
							Jumlah Petugas dalam Operasi Gabungan ketempat-tempat yang berpotensi penyebab terjadinya kekerasan	120 orang	
							Jumlah Fasilitasi Rumah Aman	12 bulan	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
				Persentase OPD yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	90%	Pengelolaan Kota Layak Anak	Jumlah Fasilitasi Evaluasi dan Monitoring Kota Layak Anak	1 kali	338.900.000
							Jumlah Peserta Pemilihan dan Pengiriman Duta Anak Kota Blitar	50 orang	
							Jumlah Fasilitasi Dewan Perwakilan Anak dan Forum Anak	12 bulan	
							Jumlah Fasilitasi Puspaga	12 bulan	
							Jumlah Fasilitasi Pembinaan De Kelana	1 kali	
							Jumlah peserta workshop tentang Kecamatan dan Kelurahan, Sekolah, dan Puskesmas ramah anak	100 orang	
Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase angka kesertaan ber KB atau CPR (contraceptive prevalence rate)	75,15%	Advokasi Penggerakan dan Informasi tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Pembinaan Kampung KB	6 lokasi	462.568.865
							Jumlah Pembentukan Kampung KB	1 lokasi	
							Jumlah kader PPKBD yang menerima bingkisan peningkatan kesejahteraan	28 orang	
							Jumlah Kader KB yang menerima Insentif	341 orang	
							Jumlah Peserta Kampanye KB Keliling	50 orang	
							Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi ADPIN	230 orang	
							Jumlah Peserta Perjaringan Calon Akseptor KB di Kelurahan se-Kota Blitar	750 orang	
							Jumlah Akseptor yang terlayani pada MOW Mobile	42 orang	
						Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah peserta penguatan KB Pria / Jambore di Masing - masing Kecamatan se Kota Blitar	300 orang	404.205.500
							Jumlah aplikasi yang dibuat untuk menunjang laporan pelayanan KB	1 unit	
							Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Program KB (Monev klinik dan PPKBD)	6 kali	
							Jumlah sarana dan prasarana pendukung program KB	13 jenis	
							Jumlah pelaksanaan kegiatan yang menunjang Program KB di Lapangan	10 kali	
							Jumlah Fasilitasi Inisiasi Pembentukan KB		
							Jumlah Fasilitasi Sekolah Siaga Kependudukan dan Pembinaan Rumah Data	2 kali	
								9 kelompok	
				Capaian median usia nikah pertama wanita	21	Pengendalian Penduduk			208.628.500

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota Tribina dan UPPKS yang menjadi peserta KB	91,9%	Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Pertemuan Penyusunan Hasil Analisa Kependudukan	6 kali	176.645.400
							Jumlah Peserta Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan	150 orang	
							Jumlah Fasilitasi Pembinaan Saka Kencana	110 orang	
							Jumlah peserta Pembinaan Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	200 orang	
							Jumlah peserta Pembinaan COE Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	144 orang	
							Jumlah peserta Fasilitasi Pembinaan PIK-R	250 orang	
							Jumlah peserta yang berpartisipasi pada kegiatan dalam rangka Hari Keluarga Nasional	175 orang	
							Jumlah Peserta Workshop bagi Kelompok UPPKS (Pembinaan UPPKS)	150 orang	

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota

Blitar

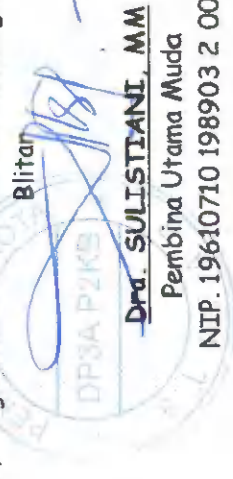


PENGUKURAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang terlibat dalam Organisasi kemasyarakatan dibagi jumlah wanita usia 17 - 60 tahun di kota Blitar dikalikan 100 %	36,02%	42,17%	117,07		Program Pemberdayaan Perempuan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	969.007.750 780.059.254 63.825.100 8.503.000	964.611.815 760.129.903 63.803.000 8.503.000	99,55 97,45 99,97 99,98	
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \frac{(P_t - P_0)(1/t) - 1}{P_0}$	1,22	0,67	145,08		Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.945.023.865	2.733.905.438	92,83	
3	Terselesainya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan / jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100%	100%	100%	100		Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	176.645.400 582.842.700	171.707.500 515.415.720	97,20 88,43	
JUMLAH									5.525.909.069	5.233.076.376	94,70%	

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota

Blitar

Dra. SULISTIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610710 198903 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Dra. SULISTIANI, MM
Jabatan	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama	Dr. Ir. JUMADI, M.MT
Jabatan	Pjs. Walikota Blitar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pjs. WAKILOTA BLITAR



Dr. Ir. JUMADI, M.MT

Blitar, 23 Oktober 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
Dan Keluarga Berencana Kota Blitar



Dra. SULISTIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610710 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR

NO	Kinerja Utama / Tujuan/Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	36,02 %
2	Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,22 %
3	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	2,00 %
4	Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %
5	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
I	Program Pelayanan Perkantoran	780.059.254,00	
II	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	63.825.100,00	
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	8.505.000,00	
IV	Program Pemberdayaan Perempuan	969.007.750,00	
V	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.945.023.865,00	
VI	Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	582.842.700,00	
VII	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	176.645.400,00	
JUMLAH TOTAL		5.525.909.069,00	

Blitar, 23 Oktober 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Blitar

Pjs. WAKOTA BLITAR

Dr. J. JUMADI, M.MT

Blitar, 23 Oktober 2020
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Blitar

Dra. SULISTIANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610710 198903 2 003